

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak kekayaan alam dan hayati yang sangat beraneka ragam untuk dapat dijadikan sebuah produk dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Pada saat ini negara Indonesia sedang meningkatkan pembangunan dari beberapa sektor mulai dari sektor ekonomi hingga pertanian. Pariwisata di Indonesia pada 5 tahun terakhir ini yaitu tahun (2014-2018) mengalami perkembangan yang sangat pesat. (BPS,2020). Data tersebut menunjukkan bahwa kunjungan wisman ke Indonesia mengalami peningkatan 14% per tahun.

Dengan melihat perkembangan pesat pariwisata di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil keputusan untuk membuat dan membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sendiri merupakan sebuah pilar dalam kegiatan ekonomi di sebuah desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu, BUMDes juga mempunyai peran sebagai sebuah lembaga sosial yang berpihak pada suatu kepentingan masyarakat melalui kontribusi-kontribusi yang diberikan dalam sebuah pelayanan sosial (Rahman, dkk., 2020). Berbeda jika digunakan sebagai lembaga komersial, BUMDes memiliki tujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke sebuah pasar.

Salah satu BUMDes yang terdapat di Kabupaten Klaten yaitu BUMDes Murakabi, Desa Kebondalem Kidul, Kecamatan Prambanan. BUMDes Murakabi memanfaatkan Desa Kebondalem Kidul sebagai salah satu Desa Wisata yang terdapat di Klaten, khususnya di Kecamatan Prambanan (Visit Klaten, 2021). data menunjukkan bahwa di dalam Kecamatan Prambanan terdapat 16 desa dengan luas wilayah sekitar 24,43 km. Kecamatan Prambanan mempunyai destinasi tempat wisata bersejarah yaitu seperti Candi Prambanan, Candi Sojiwan, dan Candi Plaosan. Dikatakan sebagai desa

wisata karena Desa Kebondalem Kidul mempunyai potensi wisata yang terdapat di desa tersebut, seperti nilai-nilai dan situs-situs budaya yang bersejarah yang masih terjaga hingga sekarang.

Hal tersebut juga menjadikan Desa Kebondalem Kidul menjadi salah satu Desa Wisata yang berkembang karena mempunyai lokasi yang dekat dengan tempat wisata Candi Sojiwan. Desa Wisata Kebondalem Kidul yang dikelola oleh BUMDes Murakabi dan dibantu oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang bernama Gendewa terus berupaya untuk terus meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut. Walaupun masih dikatakan sebagai desa wisata yang masih berkembang dan belum maju, tetapi para pengurus mulai dari BUMDes hingga Pokdarwis Gendewa tidak berputus asa untuk terus melakukan pengembangan agar Desa Wisata Kebondalem Kidul mengalami kemajuan.

Desa Wisata Kebondalem Kidul ini memiliki kelebihan tersendiri dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal, yaitu dengan melatih masyarakat untuk membuat kerajinan batik tulis alami dan melestarikan tarian-tarian tradisional. Para wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Kebondalem Kidul dapat menikmati fasilitas seperti area untuk berkuda, bersepeda mengelilingi Desa Kebondalem Kidul, membatik, dan menikmati permainan tradisional yang diberikan dari desa wisata tersebut (Nasirullahsitam, 2021: 02).

Dikembangkannya pariwisata di dalam pedesaan juga diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dalam segi perekonomian masyarakat dan memberikan pengalaman bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kreatifitas mereka untuk berupa meningkatkan desa wisata tersebut agar terus dikenal oleh kalangan masyarakat luar. Masyarakat dalam desa tersebut juga akan diberdayakan oleh adanya desa wisata. Pada satu sisi, masyarakat akan mendapatkan pelatihan dari para pengurus mengenai berbagai bentuk pekerjaan yang dapat dilakukan. Di lain sisi, pemerintah setempat dan pengurus desa wisata akan membantu dalam dukungan sarana dan prasarana pengoptimalan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat.

Namun adanya pandemi Covid-19 ini membuat semua sektor mengalami penurunan, khususnya pada sektor pariwisata. Sektor pariwisata mencakup sektor sosial dan sektor ekonomi masyarakat yang juga mengalami perubahan cukup drastis, dimana banyak sekali pihak-pihak di dalamnya yang ikut terdampak dari pandemi Covid-19 ini. Pandemi Covid-19 ini memberikan pukulan bagi industri pariwisata, karena dengan adanya pandemi ini banyak pengelola tempat wisata yang menutup tempat wisata mereka. Destinasi wisata ditutup untuk membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 ini. Selain itu, diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara tidak langsung juga menyebabkan penurunan jumlah wisatawan yang sangat *signifikan*.

Kunjungan wisatawan wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk tahun 2020 yang dilansir dari www.kemendparekraf.go.id berjumlah 4.052.923 kunjungan dan hal tersebut mengalami penurunan sebesar 74,84% dibandingkan pada tahun 2019 yang berjumlah 16.108.600 kunjungan (Kemendparekraf, 2020). Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan mancanegara terutama ke wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan dampak dari meningkatnya pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum juga mereda. Kota Klaten yang merupakan kawasan Daerah Jawa Tengah sempat memasuki wilayah zona merah dalam pandemi Covid-19 ini. Hal tersebut juga yang membuat Desa Wisata Kebondalem Kidul juga ikut terdampak dengan berkurangnya jumlah wisatawan dan penutupan tempat wisata tersebut juga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Desa Kebondalem Kidul.

Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Kebondalem Kidul karena dampak dari Pandemi Covid-19 membuat desa wisata ini ditutup untuk para wisatawan luar daerah maupun wisatawan lokal. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan masyarakat di desa tersebut menjadi ikut terdampak. Dampak langsung yang dirasakan yaitu masyarakat di sana kehilangan pekerjaan mereka. Pekerjaan yang biasanya mereka lakukan saat belum terjadinya pandemi yaitu dengan berjualan di sekitar desa wisata, menyewakan dokar untuk mengelilingi desa wisata, menyewakan sepeda, membuat batik dan mengajarkan tarian untuk wisatawan yang datang ke Desa

Wisata Kebondalem Kidul. Khusus pada hari Minggu pagi selalu diadakan *car free day* mulai dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Tetapi setelah terjadinya pandemi Covid-19, kegiatan-kegiatan tersebut harus terhenti karena tidak adanya pengunjung yang datang dan pada saat bersamaan, pemerintah juga memberlakukan PSBB untuk seluruh daerah. Setelah Desa Wisata Kebondalem Kidul ditutup, sebagian besar masyarakat di desa tersebut kehilangan pekerjaan utama mereka. Oleh karena itu masyarakat di sana tidak dapat melakukan aktifitas mereka seperti biasanya. Padahal dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat di sana mampu bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan pekerjaan di Desa Wisata Kebondalem Kidul. Masyarakat yang tidak dapat berjualan maupun melakukan aktifitas karena ditutupnya desa wisata dan larangan berjualan tersebut secara tidak langsung menyebabkan pendapatan atau penghasilan mereka menurun dari sebelumnya. Jika terdapat anggota keluarga yang ikut terkena PHK di tempat kerjanya, kondisi ini semakin membuat keluarga tersebut merasakan dampak yang lebih karena tidak tahu harus melakukan hal apa untuk memperoleh penghasilan.

Ditutupnya Desa Wisata Kebondalem Kidul menyebabkan sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan mereka. Kondisi ini menjadi persoalan utama yang harus dipikirkan oleh BUMDes Murakabi dan Pokdarwis Gendewa agar bisa memberikan dukungan untuk masyarakat di desa tersebut. BUMDes dan Pokdarwis harus mencari upaya atau cara untuk memberdayakan masyarakat di Desa Wisata Kebondalem Kidul agar kembali mempunyai kegiatan atau melakukan aktivitas pekerjaan untuk mengembalikan penghasilan mereka walaupun tidak seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Untuk memberdayakan masyarakat, BUMDes dan Pokdarwis Desa Wisata Kebondalem Kidul harus melihat berbagai faktor. Mulai dari faktor internal maupun eksternal untuk memberdayakan masyarakat di desa tersebut. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa Febriana dan Meirinawati (Febriana & Meirinawati, 2020: 29-42). Mereka menjelaskan bahwa dalam melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat di tengah pandemi ini,

harus juga melihat dari faktor eksternal seperti melihat peluang yang ada dari desa wisata tersebut dan melihat dari ancaman-ancaman yang akan terjadi.

Tidak hanya itu, BUMDes dan Pokdarwis dalam melakukan upaya juga harus mempunyai tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan dengan matang. Tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan oleh BUMDes dan Pokdarwis harus mengacu dan menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dikatakan demikian karena sampai saat ini kita semua masih berada dalam situasi pandemi Covid-19. Hal tersebut juga dikatakan pada penelitian yang dilakukan oleh Fathir Adhitya dan Hardi bahwa untuk memberdayakan masyarakat pada desa wisata dalam kondisi pandemi Covid-19 harus menyiapkan dua (2) tahap yaitu tahap pelaksanaan dan tahap persiapan (Adhitya & Hardi, 2021: 27). Tahapan-tahapan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan saat kita menjalani aktivitas di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka BUMDes Murakabi dan Pokdarwis Gendewa perlu memberdayakan masyarakat Desa Wisata Kebondalem Kidul pada saat masa pandemi Covid-19. Upaya tersebut harus dilakukan untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat di Desa Kebondalem Kidul, Prambanan, Klaten. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait upaya apa yang akan dilakukan atau baru akan dilakukan BUMDes dan Pokdarwis untuk memberdayakan masyarakat di sekitar Desa Wisata Kebondalem Kidul pada saat pandemi Covid-19.

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apa saja upaya yang dilakukan oleh BUMDes Murakabi dan Pokdarwis Gendewa untuk memberdayakan masyarakat di Desa Wisata Kebondalem Kidul pada saat masa Pandemi Covid-19 ini?
2. Apa saja kendala BUMDes Muarakabi dan Pokdarwis Gendewa dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa Wisata Kebondalem Kidul di tengah pandemi Covid-19 ini?
3. Apa saja solusi dari BUMDes Murakabi dan Pokdarwis Gendewa dalam mengatasi kendala-kendala dalam memberdayakan masyarakat di Desa Wisata Kebondalem Kidul pada masa pandemic covid.

C. Kajian Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Indah Andayani, Maria Veronika, Wiwin Yulianingsih (2021) yang berjudul *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaku UMKM di Masa Pandemi Covid-19*. Penelitian tersebut mempunyai kesimpulan bahwa pada masa pandemi Covid-19 UMKM yang terdapat di Kabupaten Kediri mengalami penurunan pendapatan. Penurunan daya beli konsumen dari sektor pemasaran tradisional dengan penutupan sektor pariwisata merupakan tantangan pelaku UMKM dalam menjalankan produksi usaha. Pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM dengan memberikan sebuah upaya atau program yang dapat dilakukan oleh UMKM Kabupaten Kediri. Upaya atau program tersebut dengan memberdayakan masyarakat untuk membuat dan memperjualbelikan produk *handsanitizer*, masker dan kebutuhan yang diperlukan selama masa pandemi Covid-19. Upaya tersebut juga didukung dengan dilakukannya pemasaran melalui sebuah pasar *online*. Penelitian di atas menggunakan metode kualitatif.

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis terletak pada teori dan metode yang digunakan. Penulis dan penelitian di atas sama-sama menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 saat ini dan melihat upaya apa yang dilakukan agar masyarakat tetap

mendapatkan penghasilan di tengah pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan penulis sama seperti penelitian di atas yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi. Manfaat yang dihasilkan dari penelitian di atas yaitu membantu penulis mendapatkan gambaran lebih jelas tentang teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini. Untuk perbedaan dapat dilihat dari subyek penelitian. Subyek penelitian dari penelitian yang penulis akan lakukan yaitu BUMDes dan Pokdarwis, sedangkan subyek penelitian di atas adalah UMKM Kabupaten Kediri. Perbedaan lainnya dilihat dari lokasi penelitian, penulis melakukan penelitian di Desa Wisata Kebondalem Kidul Prambanan, Kabupaten Klaten. Berbeda dengan penelitian di atas yang dilakukan Kabupaten Kediri.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fathir Adhitiya dan Hardi (2021) berjudul *Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes Delta Mulia di Desa Panempan pada Masa Pandemi Covid-19*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. Dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes pada saat masa pandemi Covid-19 di Desa Panempan dilakukan dengan menggunakan dua tahap yaitu tahap pelaksanaan dan tahap persiapan. Tahapan yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat. BUMDes Delta Mulia melakukan tahapan tersebut agar pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena upaya tersebut dilakukan untuk tetap memberikan ruang untuk tetap beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup masyarakat tersebut.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis akan lakukan dapat dilihat dari konsep, yaitu sama-sama menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tersebut dilihat dari upaya yang dilakukan BUMDes agar masyarakat tetap mendapatkan penghasilan atau beraktivitas di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Perbedaannya, penelitian yang akan penulis lakukan berlokasi di Desa Wisata Kebondalem Kidul Prambanan, Kabupaten Klaten, sedangkan penelitian di atas dilakukan di Desa Panempan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Perbedaan

selanjutnya dari subyek penelitian dimana penelitian di atas hanya menggunakan BUMDes Delta Mulia, sedangkan subyek penelitian penulis yaitu BUMDes dan Pokdarwis. Manfaat yang diperoleh penulis dari penelitian di atas yaitu dapat membantu penulis dalam menemukan referensi bacaan buku maupun jurnal.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hazrul Iswadi, Lanny Kusuma Widjaya, Endang Ernawati dan Frikson Cristian (2021). Penelitian tersebut berjudul *Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi Untuk Mengelola Desa Wisata Kedungudi*. Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa Desa Kedungudi, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto mengembangkan desa tersebut menjadi desa wisata. Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi (PPMUPT) melakukan beragam upaya untuk menjalankan program tersebut. Tim PPMUPT Desa Wisata Kedungudi melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan partisipatoris dan fasilitatif. Untuk menggerakkan program tersebut, tim PPMUPT menggandeng pokdarwis dan tim PKK. Program ini juga secara tidak langsung membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19, terutama dalam bidang ekonomi mereka. Hal ini juga dilihat dari kondisi politik lokal yang sangat berpengaruh pada keberhasilan program tersebut.

Kesamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang penulis akan lakukan yaitu terletak pada teori yang akan digunakan. Peneliti dalam penelitian di atas dan penulis sama-sama menggunakan pendekatan metode kualitatif. Teori yang digunakan juga sama, yaitu teori pemberdayaan masyarakat. Persamaan lainnya dapat dilihat dari topik penelitian yaitu sama-sama menyorot pada upaya yang dilakukan oleh BUMDes dan Pokdarwis dalam memberdayakan masyarakat di tengah pandemi Covid 19 ini. Manfaat yang didapat penulis dari penelitian di atas yaitu dapat membantu penulis untuk menemukan konsep yang tepat dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Untuk perbedaannya, penelitian yang akan penulis lakukan hanya melihat dari sisi kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Desa Wisata Kebondalem Kidul, sedangkan penelitian di atas lebih melihat secara keseluruhan dari kondisi sosial-ekonomi hingga kondisi politik lokal dari Desa Kedungudi. Tidak hanya itu saja, perbedaan lainnya juga

dapat dilihat dari subyek penelitiannya. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, subyeknya adalah BUMDes dan Pokdarwis, berbeda dengan penelitian di atas yang subyek penelitiannya hanya Pokdarwis.

Penelitian **keempat**, dilakukan oleh Desi Pramadani (2021) dengan judul *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa New Normal di Desa Cakura Kabupaten Takalar*. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian metode kualitatif deskriptif tersebut bahwa Desa Cakura Kabupaten Takalar mempunyai masalah pada kondisi ekonomi dan kondisi sosial pada saat masa pandemi Covid 19 saat ini. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, banyak masyarakat di Desa Cakura yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini menyebabkan menurunnya pendapatan mereka. Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Cikular tersebut mendapat respons yang baik oleh pemerintah desa setempat. Pemerintah Desa Cikular memberikan program pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat Desa Cikular terutama masyarakat yang terkena PHK dari tempat kerjanya. Pemerintah Desa memberikan program-program yang dapat menghasilkan penghasilan bagi warganya dan tidak hanya itu, masyarakat Desa Cikular pun dapat melakukan aktivitas selama masa pandemi Covid-19. Walaupun program pemerintah desa belum berjalan secara baik tetapi pemerintah Desa Cikular akan tetap memperbaiki program-program yang diberikan untuk warganya.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Persamaan selanjutnya adalah teori yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan teori pemberdayaan masyarakat. Manfaat dari penelitian di atas yaitu memberikan gambaran umum kondisi di lapangan terutama saat kondisi pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada topik penelitian. Topik penelitian penulis mengenai upaya BUMDes dan Pokdarwis dalam memberdayakan masyarakat di tengah pandemi Covid-19, berbeda dengan topik penelitian di atas yang lebih mengkaji peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di era *new normal*. Perbedaan selanjutnya terlihat dari subyek penelitian. Subyek penelitian penulis adalah

BUMDes dan Pokdarwis, sedangkan subyek penelitian di atas yaitu pemerintah desa. Perbedaan lainnya yaitu pada obyek penelitian dimana obyek penelitian penulis adalah desa wisata sedangkan obyek penelitian di atas adalah desa secara umum yang bukan dikategorikan sebagai desa wisata.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Puji Hadiyanti (2018) dengan judul *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keterampilan Produktif di PKBM Rawasari, Jakarta Timur*. Kesimpulan yang didapat dari penelitian di atas yaitu dalam melaksanakan program pemberdayaan, PKBM Rawasari belum sepenuhnya melakukan pemberdayaan secara holistik. Strategi yang diberikan kepada masyarakat pun belum sepenuhnya mengacu pada konsep-konsep pemberdayaan yang digunakan. PKBM Rawasari dalam memberikan program pemberdayaan lebih menekankan pada tahapan-tahapan yang diberikan untuk masyarakat. Tahapan yang digunakan oleh PKBM Rawasari dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu menggunakan tahapan seleksi lokasi, tahapan sosialisasi dan tahapan proses pemberdayaan masyarakat.

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu topik yang sama-sama mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui proses tahapan-tahapan yang diberikan. Perbedaan dari penelitian tersebut terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian penulis berada di daerah Prambanan Klaten sedangkan penelitian di atas berada di Daerah Gresik. Perbedaan yang selanjutnya dilihat dari desa tempat penulis melakukan penelitian. Penulis lebih menekankan pada Desa Wisata sedangkan penelitian di atas lebih menekankan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Manfaat dari penelitian di atas yaitu membantu penulis dalam menemukan indikator pada pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh NilzamAly, Bambang, Sri Endah, Nuruddin dan Ria Triwastuti (2020) yang berjudul *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendampingan Desa Wisata di Desa Bejijong Mojokerto*. Kesimpulan yang didapat yaitu program pendampingan desa wisata yang dilakukan memiliki dampak yang positif untuk masyarakat. Masyarakat paham akan ketrampilan dan pengembangan yang diberikan oleh Mitra. Program yang diberikan sudah termasuk

dalam tahapan-tahapan yang dilakukan oleh mitra. Tahapan yang diberikan untuk masyarakat berupa tahap sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Program dari tahapan yang diberikan berfokus pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Kesamaan dari penelitian di atas yaitu dengan penelitian yang penulis akan lakukan yaitu sama-sama mengkaji mengenai pemberdayaan masyarakat di dalam desa wisata. Kesamaan selanjutnya yaitu dilihat dari topik penelitian mengenai tahapan pemberdayaan yang dilakukan. Penelitian yang penulis akan lakukan juga berfokus pada tahapan yang diberikan oleh BUMDes dan Pokdarwis untuk masyarakat di sekitar desa wisata. Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu dilihat dari waktu penelitian. Penulis melakukan penelitian pada saat masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian di atas dilakukan pada saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian dan subyek penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di Desa Wisata Kebondalem Kidul Prambanan, Klaten dan subyek penelitian penulis yaitu BUMDes dan Pokdarwis, berbeda dengan penelitian di atas yang melakukan penelitian di Desa Wisata Bejjong Mojokerto dan subyek penelitiannya berfokus pada mitra kerja.

D. Kerangka Konseptual

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan, yang dalam Bahasa Inggris lebih dikenal dengan *power*. Dikatakan sebagai pemberdayaan karena memiliki sebuah makna perencanaan, proses dan upaya penguatan untuk masyarakat yang dapat dikatakan kurang beruntung (Yunus, 2017: 3). Pemberdayaan masyarakat juga memberikan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, sehingga masyarakat tersebut dapat melepaskan diri dari kondisi ekonomi yang kurang baik tersebut. Upaya yang dilakukan yaitu untuk membangun kemampuan masyarakat dengan memberikan dorongan, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi menjadi sebuah tindakan yang nyata (Zubaedi, 2013).

Pemberdayaan juga sering disebut sebagai sebuah rangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan suatu kemampuan atau keunggulan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk golongan-golongan masyarakat yang mengalami masalah atau kondisi kemiskinan. Pemberdayaan mengarah pada kemampuan individu untuk ikut berpartisipasi memperoleh kesempatan dalam memperbaiki kehidupan. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara individual, kelompok, dan masyarakat dalam arti yang luas. Pemahaman pemberdayaan tersebut dapat diartikan sebagai proses rencana dalam meningkatkan skala utilitas dari sebuah obyek yang akan diberdayakan (Mardikanto & Soebianto, 2015: 61).

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk membuat masyarakat lebih mandiri. Hal tersebut dilihat dari sebuah perwujudan potensi kemampuan yang masyarakat atau individu miliki. Pemberdayaan masyarakat juga tidak jauh akan hal dua kelompok yang saling terkait, masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak kedua atau sebuah lembaga yang menjadi pihak menaruh kepedulian dan dikatakan sebagai pihak yang memberdayakan (Mardikanto & Soebianto, 2015: 52).

Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai sebuah “proses menjadi” bukan suatu “proses instan”. Pemberdayaan bukanlah suatu proses yang instan dalam melakukannya, perlu adanya suatu tahap berproses untuk menjadi seperti apa yang sudah direncanakan. Untuk menjadi pemberdayaan yang dikatakan berhasil harus membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena harus melewati beberapa tahapan dan dari tahapan tersebut harus melakukan pengujian. Pengujian tersebut dilakukan untuk melihat apakah dari tahap-tahap tersebut berhasil atau tidaknya untuk melakukan proses pemberdayaan. Menurut Randy R Wrihantolo dan Riant Nugroho, suatu proses pemberdayaan mempunyai 3 tahap yaitu: tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan (Wrihatnolo dan Wijowojoto, 2007). Maka dari hal itu pemberdayaan pada akhirnya bukanlah hanya sekedar teori sebagaimana dikatakan oleh Ron Jonshon dan David Redmod dalam buku *The Art Empowerment* (1992) bahwa suatu pemberdayaan menjadi salah satu praktik dan suatu seni. Hal tersebut juga dikemukakan yaitu proses

pemberdayaan tidak boleh mempunyai makna ‘merobotkan’ atau ‘menyeragamkan’. Pemberdayaan juga harus memberikan sebuah ruang pada suatu pengembangan keberagaman, artinya yaitu bahwa setiap manusia mempunyai sebuah kemampuan yang beragam antara satu dengan lainnya yang pada akhirnya satu sama lain tersebut akan melengkapi suatu proses pemberdayaan dan proses tersebut dikatakan sebagai suatu proses alamiah (Wrihatnolo & Wijowojoto, 2007: 7).

Menurut Randy R Wrihantolo dan Riant Nugroho, masyarakat mempunyai 3 tahapan untuk menjalankan suatu pemberdayaan. Tiga tahapan-tahapan tersebut yaitu tahapan penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Tiga tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Tahap pertama yaitu **tahap penyadaran**, yaitu tahap memberikan penyadaran bagi masyarakat bahwa mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesetaraan yang sama dengan masyarakat lainnya. Hak tersebut seperti hak dalam mencari penghasilan atau hak untuk mengubah kehidupan mereka menjadi keluar dari zona kemiskinan. Tahap penyadaran ini juga memberikan pengetahuan terhadap masyarakat, pengetahuan tersebut harus bersifat *kognitif, belief dan healing*. Pengetahuan tersebut pada dasarnya membuat masyarakat mengerti bahwa mereka perlu saling membangun pada saat diberdayakan. Masyarakat juga harus mengerti dalam proses pemberdayaan tersebut dimulai dari dalam diri masing-masing masyarakat, bukan dari orang lain. Pengetahuan yang bersifat *kognitif, belief dan healing* dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Kognitif*, yaitu pengetahuan yang diberikan untuk masyarakat agar dapat mempunyai kemampuan berpikir yang didasari sebuah pengetahuan dan wawasan untuk memberikan sebuah solusi dalam masalah yang sedang dihadapi.
- b. *Belief* adalah pengetahuan yang memberikan keyakinan kepada masyarakat agar mereka yakin dalam menjalankan sebuah pemberdayaan dari dalam diri masing-masing masyarakat dan tidak bergantung pada orang lain dalam melakukannya.

- c. *Healing* adalah pengetahuan yang diberikan dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat untuk diberikan sebuah motivasi agar mereka dapat bangkit dan keluar dari zona kemiskinan sehingga mampu menjalankan pemberdayaan yang diberikan dengan baik.

Tahap kedua adalah **tahap pengkapasitasan**, tahap ini juga sering disebut sebagai tahap "*capacity bulding*". Tahap pengkapasitasan dapat diartikan sebagai tahap meningkatkan kapasitas di dalam diri masyarakat. Peningkatan tersebut bisa dimulai dari individu maupun kelompok masyarakat dengan diberikannya sebuah pelatihan, seminar, dan sosialisasi. Tahap pengkapasitasan juga harus dilakukan dengan cara mengubah struktur organisasi mereka atau dengan cara membentuk organisasi baru dengan menyesuaikan dari kegiatan yang akan dilakukan. Dalam peningkatan kapasitas juga harus melihat dari nilai atau aturan kerja yang sudah disepakati oleh masyarakat tersebut. Diberikannya sebuah bimbingan juga akan memudahkan masyarakat untuk lebih mengerti dengan apa yang harus mereka kerjakan.

Tahap ketiga yaitu **tahap pendayaan**, pada tahap ini masyarakat akan diberikan sebuah daya, kekuasaan, otoritas maupun peluang. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan strategi dalam memecahkan masalah. Pada tahap ini, pemberian daya dan kekuasaan harus diberikan secara rata dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Artinya bahwa pemberian daya tidak membeda-bedakan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya yang mempunyai perbedaan dalam ketrampilan. Pemberian daya tersebut digunakan untuk masyarakat bersama-sama harus mampu mengelola pemberdayaan yang diberikan oleh BUMDes. Dengan memberikannya peluang pada sebuah kelompok masyarakat golongan miskin atau kurang mampu secara tidak langsung juga menyadarkan mereka bahwa masyarakat tersebut sudah melalui proses penyadaran dan pengkapasitasan dari pengelolaan usaha yang masyarakat sedang jalankan (Wrihatnolo & Wijowojoto, 2007: 7).

Elisheva, Sadan tahun 1997 dalam buku *Empowerment and Community Planning* menjelaskan bahwa sebuah perencanaan masyarakat dan sebuah pemberdayaan masyarakat terdapat 5 hasil yaitu meliputi:

1. Pembentukan organisasi masyarakat yang memberdayakan
2. Kegiatan masyarakat yang meluas
3. Kesadaran masyarakat yang aktif
4. Peruntukan ruang dan tanggung jawab
5. Peningkatan kualitas hidup dan sikap dari masyarakat itu sendiri

Setiap tingkat yang berbeda-beda tersebut menunjukkan bahwa sebuah pemberdayaan adalah suatu proses yang terjadi secara bersamaan pada tingkat lembaga manusia dan sebuah struktur sosial. Pemberdayaan masyarakat dapat stabil jika pemberdayaan tersebut terus dilestarikan pada tingkat kesadaran individu dari banyaknya anggota masyarakat, serta dari norma dan nilai-nilai dari struktur sosial. Perubahan sosial juga akan terbentuk melalui Tindakan-tindakan individu yang menghasilkan sebuah nilai-nilai baru melalui perilaku dan wacana mereka. Proses sosial juga akan terbentuk menjadi bermakna melalui kerangka komunitas baru yang memungkinkan membuat sebuah perbedaan dan memperkuat perubahan sosial tersebut

Menurut Kartasasmita, pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan sebuah harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dapat dikatakan sebagai kondisi yang kurang mampu. Harkat martabat yang dimaksudkan yaitu dalam hal mengubah kondisi dari kehidupan dari masyarakat tersebut menjadi kehidupan yang lebih sejahtera dalam berkehidupan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh beberapa pihak yaitu dengan menjalankan suatu pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga dikatakan oleh Widayanti bahwa suatu pemberdayaan masyarakat menjadi *concern public* dan dinilai sebagai salah satu pendekatan untuk menangani suatu masalah sosial terutama dalam hal kemiskinan. Dengan menerapkan pendekatan tersebut juga merupakan suatu upaya untuk memberikan kekuatan bagi masyarakat untuk bisa memecahkan permasalahan sosial dan ekonomi yang sedang masyarakat tersebut hadapi (Martono & Muhammad, 2017: 23)

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai usaha dalam membuat strategi alternatif dalam pembangunan yang telah berkembang dalam berbagai literatur dan suatu pemikiran walaupun kenyataannya belum mencapai maksimal dalam hal implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang banyak diperbincangkan oleh kalangan masyarakat karena hal tersebut mempunyai keterkaitan dalam kemajuan dan perubahan negara maupun daerah. Jika suatu negara mempunyai kemajuan dalam pembangunan dan proses pemberdayaan maka secara tidak langsung *skill* yang dimiliki masyarakat tersebut juga akan berkembang mengikuti perubahan dari kemajuan yang diciptakan di daerah masing-masing (Martono dan Muhammad, 2017: 88)

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan teori untuk memperkuat penelitian tersebut. Dalam hal ini penulis sudah menemukan beberapa teori yang sudah dijelaskan seperti di atas. Setelah dibaca dan dipahami, penulis memutuskan untuk menggunakan teori pemberdayaan dari Randy R Wrihantolo dan Riant Nugroho yaitu dalam teori ini dijelaskan bahwa dalam melakukan pemberdayaan harus melalui 3 tahapan. Tahapan tersebut yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

2. Desa Wisata

Menurut Chafid Fadeli, pengertian dari Desa Wisata yaitu suatu wilayah pedesaan yang memberikan keseluruhan suasana yang mencirikan keaslian dari suatu desa. Baik dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, aktivitas masyarakat, arsitektur tatanan desa dan potensi yang dapat dikembangkan untuk menarik wisata mulai dari program yang dihasilkan, makanan, cindramata, penginapan dan kebutuhan wisata lainnya (Hidayah, 2017).

Desa Wisata juga dapat dikatakan sebagai pengembangan dari suatu desa yang sudah memiliki potensi wisata dan dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung. Fasilitas tersebut meliputi alat transportasi dan penginapan. Melalui desa wisata, aktifitas-aktifitas keseharian masyarakat menjadi sebuah daya tarik bagi pengunjung, sehingga desa wisata tidak mengubah wajah desa tetapi lebih untuk memperkuat

kekhasan yang dimiliki oleh setiap desa. Baik dari kekhasan budaya maupun dari alamnya.

Nuryanti menjelaskan bahwa desa wisata merupakan bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam satu struktur kehidupan bermasyarakat yang menyatu dengan tatacara dan tradisi yang berlaku dalam desa tersebut (Sidiq & Resnawati, 2019: 39-40). Desa Wisata juga mempunyai komponen penting. Pertama komponen tersebut dilihat dari akomodasi dari tempat tinggal penduduk yang sudah berkembang. Kedua dilihat dari komponen antraksi yang dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya masyarakat, tetapi juga dari wisatawan yang mempunyai peran aktif dalam mengikuti kursus tari, bahasa, lukis dan hal lain yang menjadi ciri khas dari desa wisata tersebut.

a. Kriteria Desa Wisata

Desa Wisata harus mempunyai kriteria yang menjadi ciri khas atau *icon* tersendiri dari desa tersebut (Admoko, 2014: 148). Oleh karena itu Desa Wisata harus mempunyai 4 kriteria seperti yang sudah dijelaskan di bawah ini:

1. Memiliki potensi yang unik dan mempunyai daya tarik wisata yang mempunyai ciri khas berupa dari sebuah karakter fisik lingkungan alam pedesaan dan sosial budaya dari hidup bermasyarakat di desa tersebut.
2. Mempunyai dukungan dan persiapan fasilitas yang mendukung dalam hal kepariwisataan terutama dalam keterkaitan antara kegiatan wisata di dalam pedesaan.
3. Memiliki interaksi dengan relasi wisatawan yang tercerminkan dari kunjungan-kunjungan wisata.
4. Harus terdapat dukungan yang kuat dari masyarakat setempat dalam hal pengembangan desa terutama dalam hal kepariwisataan.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Muryani (2008: 35), BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang terdapat di desa yang dikelola oleh kalangan masyarakat dan pemerintah desa. BUMDes mempunyai tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan membangun sosial masyarakat untuk lebih dekat. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan sebuah usaha untuk mendapatkan suatu hasil seperti mendapatkan keuntungan dan laba (Pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007).

Menurut Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini merupakan lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat yang tinggal di wilayah desa tersebut. BUMDes merupakan pendapatan perekonomian desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*Commercial institution*) yang mempunyai kepentingan untuk masyarakat dalam mencari sebuah keuntungan.

Definisi yang disematkan pada BUMDes dalam UU Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Kekayaan tersebut dipisahkan untuk digunakan dalam mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut pasal 213 ayat 3 Undang-Undang 32 Tahun 2004 (Undang-Undang, 2004) tentang Pemerintahan Daerah yang mengemukakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi, modal usahanya harus dari inisiatif masyarakat itu sendiri. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan peminjaman modal dari pihak ketiga.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3, tujuan didirikannya BUMDes yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa atau pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan masyarakat.
- f. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa yang belum atau susah mencari pekerjaan.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan-layanan yang sudah disediakan.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Berdasarkan tujuan pembentukan tersebut membuat BUMDes menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat di pedesaan. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat mengembangkan sektor ekonomi masyarakat dan mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan.

4. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Kelompok Sadar Wisata merupakan sebuah komponen yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi penting untuk membentuk kesadaran pembangunan pariwisata di daerah tempat tinggal masyarakat tersebut (Ika Nurwahyuni, 2019:18-20). Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa Pokdarwis dapat dipahami sebagai kelompok yang bertumbuh atas pemikiran dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara dan melestarikan obyek wisata dan daya tarik wisata di daerahnya. Pokdarwis juga disebut sebagai *stakeholder* atau sebagai penggerak dalam pengembangan sektor pariwisata di daerahnya.

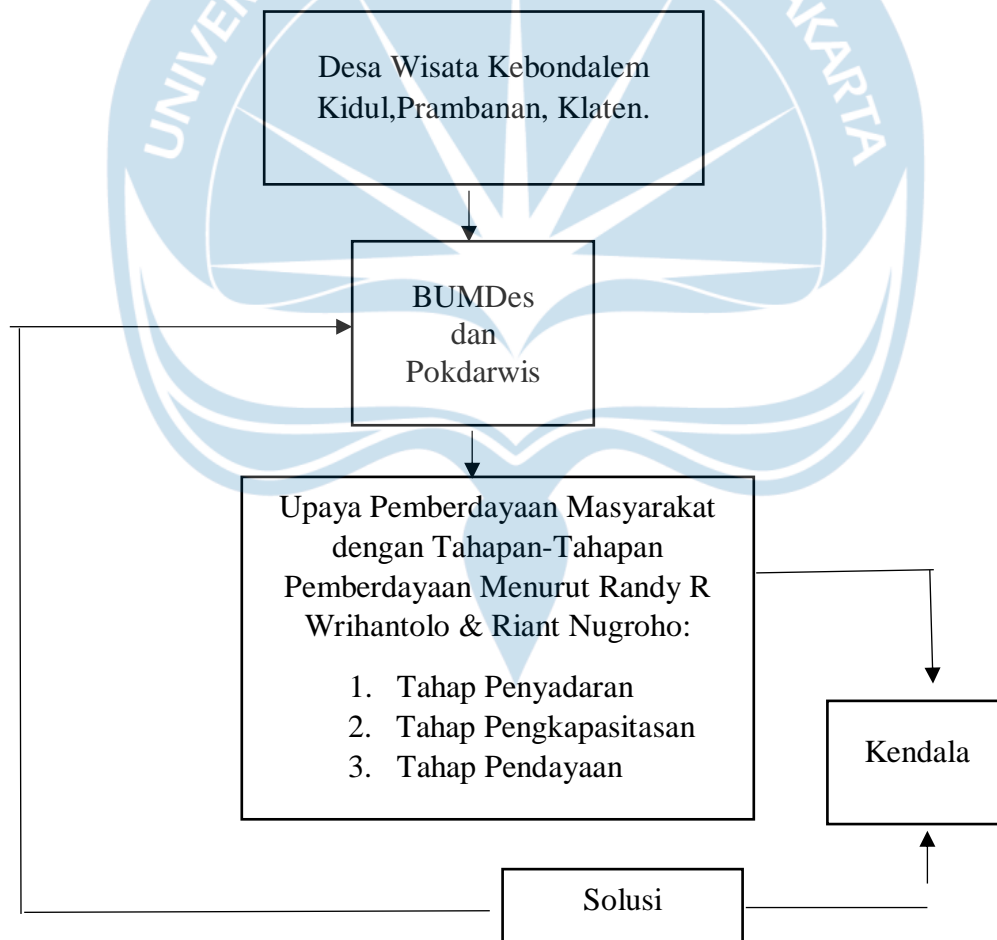
Kelompok Sadar Wisata juga mempunyai pengertian sebagai kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan. Kelompok tersebut juga memiliki kepedulian serta tanggung jawab dan mempunyai peran aktif sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya suasana yang kondusif bagi tumbuh

kembangnya suatu kepariwisataan. Dengan terwujudnya suatu suasana yang baik secara tidak langsung juga akan terwujudnya sapta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah dan menghasilkan suatu kesejahteraan masyarakat di desa yang mereka tinggali.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan konsep-konsep dari penjelasan yang penulis jelaskan di atas maka berikut ini penulis gambarkan kerangka berpikir yang direncanakan oleh penulis dalam melakukan proses penelitian:

Gambar 1: Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah oleh peneliti

Pada penelitian ini penulis menggunakan subyek BUMDes dan Pokdarwis. Penulis juga ingin mengetahui apa upaya yang dilakukan BUMDes dan Pokdarwis dalam memberdayakan masyarakat di Desa Wisata Kebondalem Kidul, Prambanan, Klaten pada masa pandemi covid-19. Selain itu penulis juga ingin mengetahui kendala-kendala internal maupun eksternal apa saja yang dihadapi oleh BUMDes dan Pokdarwis dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi covid-19 saat ini. Kemudian penulis menggunakan teori dari Randy R Wrihantolo dan Riant Nugroho mengenai tahap-tahap pemberdayaan. Teori Tahapan pemberdayaan ini terdiri dari tiga indikator yaitu: tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Penulis menggunakan teori ini untuk mendeskripsikan bagaimana upaya pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan ketiga tahap tersebut. Kemudian penulis juga akan mendeskripsikan apa kendala-kendala yang dihadapi disaat melakukan pemberdayaan menggunakan tahapan-tahapan tersebut dan penulis juga akan menjelaskan bagaimana solusi dari kendala yang sedang dihadapi saat melakukan pemberdayaan.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh BUMDes Murakabi dan Pokdarwis Gendewa dalam memberdayakan masyarakat Desa Wisata Kebondalem Kidul pada masa pandemi Covid-19.
2. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh BUMDes Murakabi dan Pokdarwis Gendewa dalam memberdayakan masyarakat Desa Wisata Kebondalem Kidul di tengah pandemi Covid-19.
3. Mengetahui solusi yang dilakukan BUMDes Murakabi dan Pokdarwis Gendewa dalam mengatasi kendala pada saat memberdayakan masyarakat Desa Wisata Kebondalem Kidul pada masa pandemi covid-19.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bab I, yaitu Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, kerangka konseptual/berpikir, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, yaitu Metodologi Penelitian yang berisi mengenai jenis penelitian dan metode penelitian, informan, operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, jenis data, cara analisis data, dan deskripsi obyek dan subyek penelitian.
3. Bab III, yaitu Temuan dan Pembahasan mengenai penjelasan tentang hasil temuan data, proses pengumpulan data, dan pembahasan dari hasil proses pengolahan data penelitian.
4. Bab IV, yaitu Kesimpulan yang berisi tentang beberapa kesimpulan yang berasal dari hasil penelitian yang pertanyaan penelitian dan ringkasan berbagai temuan penelitian.

